

Kolaborasi Antar *Stakeholders* Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang

Collaboration between Stakeholders in Landslide Disaster Management in Semarang City

Aziz Masyhuri*, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati
& Budi Puspo Priyadi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro,
Indonesia

Diterima: 02 Juni 2021 Direview: 02 Juni 2021; Disetujui: 14 Agustus 2021

*corresponding Author: azizmasyhuri19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antar *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Kolaborasi antar *stakeholder* bertujuan untuk membangun komitmen, kesepahaman, dan tanggung jawab dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan bencana yang dianalisa melalui konsep *collaborative governance* oleh Ansell & Gash (2007). Berbasis kepada pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Gajahmungkur. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisa data berdasarkan pada empat indikator *collaborative governance* meliputi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi yakni pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan juga sektor swasta, namun dalam prosesnya koordinasi yang dilakukan oleh ketiga *stakeholders* tersebut kurang berjalan dengan efektif sehingga menghambat kegiatan manajemen bencana. Akibat dari kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan bencana tanah longsor di Kota Semarang belum tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang belum berjalan dengan optimal karena kurangnya koordinasi dan minimnya peran serta dari *stakeholders* lain yang ada di luar sektor pemerintah sehingga menyebabkan bencana tanah longsor masih sering terjadi.

Kata Kunci: Kolaborasi *Stakeholders*; Manajemen Bencana; *Collaborative Governance*

Abstract

This study aims to analyze the collaboration process between stakeholders in landslide disaster management in Gajahmungkur District, Semarang City. Collaboration between stakeholders aims to build commitment, understanding, and responsibility in increasing the effectiveness of disaster management which is analyzed through the concept of collaborative governance by Ansell & Gash (2007). Based on a descriptive qualitative research approach, this research was conducted in the city of Semarang, precisely in the district of Gajahmungkur Kecamatan. Data collection was carried out by interview and documentation techniques. Data analysis is based on four indicators of collaborative governance including: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, to the collaborative process. The results of this study indicate that there are three stakeholders involved in the collaboration, namely local government, community groups, and also the private sector, however, in the process the coordination carried out by the three stakeholders is not effective enough, thus hindering disaster management activities. As a result of this lack of coordination, the landslide disaster in Semarang City has not been handled properly. Based on the results of the study, it can be concluded that the collaborative process carried out in landslide disaster management in Semarang City has not run optimally due to lack of coordination and lack of participation from other stakeholders outside the government sector, causing landslides to still occur frequently.

Keywords: Stakeholders Collaboration; Disaster Management; Collaborative Governance

How to Cite: Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A.R., & Priyadi, B.P., (2021), Kolaborasi Antar *Stakeholders* Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 854-862



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi geografis yang beraneka ragam, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, sungai, laut, dan lain sebagainya. Kondisi geografis yang beraneka ragam tersebut menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi bencana alam. Bencana alam yang seringkali terjadi di Indonesia antara lain banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Terjadinya bencana alam tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti hujan deras, cuaca ekstrem, kondisi tanah, dan ulah manusia yang tidak peduli dengan lingkungan.

Tanah longsor menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi ketika musim penghujan tiba. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Anisatul (2020) sepanjang tahun 2020 kemarin Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terjadi 2.099 bencana tanah longsor di Indonesia, dan 73 persen atau 1.500 kejadian tanah longsor terjadi di Pulau Jawa. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa yang sering dilanda bencana tanah longsor. Tercatat lebih dari 1.387 bencana tanah longsor terjadi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020, dengan korban meninggal dunia sebanyak 32 orang, dan 6.501 orang mengungsi. Kota Semarang menjadi wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang sering dilanda bencana tanah longsor setiap tahunnya. Hujan deras dan tipikal daerahnya yang berada di perbukitan dan dataran tinggi menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi bencana tanah longsor di Kota Semarang.

Tabel 1. Daftar Bencana Alam di Kota Semarang

No	Jenis Bencana	Prosentase
1	Banjir	8%
2	Tanah Longsor	51%
3	Puting Beluing	3%
4	Rumah Roboh	13%
5	Kebakaran	12%
6	Pohon tumbang	13%
	Total	100%

Sumber : BPBD Kota Semarang (2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bencana tanah longsor adalah bencana yang paling sering terjadi di Kota Semarang, yakni sebanyak 51 persen. Disusul dengan rumah roboh dan pohon tumbang sebanyak 13 persen, kebakaran sebanyak 13 persen, banjir 8 persen, dan terakhir puting beliung sebanyak 3 persen. Bencana alam di Kota Semarang mengakibatkan 12.888 orang menjadi korban serta kerugian ditaksir mencapai Rp.2.593.500.000,00. Banyaknya korban dan kerugian yang dialami oleh masyarakat menyebabkan Pemerintah Kota Semarang harus selalu waspada terhadap potensi bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan manajemen bencana yang baik, khususnya terhadap bencana tanah longsor yang sering melanda.

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana adalah suatu proses yang dinamis, berkelanjutan, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi, dan analisis bencana, serta mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Undang-undang tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tahapan manajemen bencana sendiri menurut Nurjanah, dkk (2012) terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap pra bencana, tahap saat bencana, dan tahap pasca bencana terjadi. Ketiga tahap manajemen bencana tersebut harus dilakukan secara berurutan dan tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba sehingga pemerintah harus mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam manajemen bencana. Tujuan dari manajemen bencana menurut Paidi (2012) antara lain: 1. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara. 2. Mengurangi penderitaan korban bencana. 3. Mempercepat pemulihan. 4. Memberikan



perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam. Keempat tujuan itulah yang kemudian diadopsi oleh BPBD Kota Semarang guna menanggulangi bencana tanah longsor yang sering terjadi.

Kebutuhan tersebut mulai dari SDM yang terlatih dan mumpuni, anggaran yang memadai, dan ketersediaan sarana serta prasarana yang dapat menunjang proses manajemen bencana tanah longsor. Menurut Herbert A. Simon yang dikutip oleh Syafiie (2013:3), administrasi memiliki pengertian sebagai kegiatan sebuah kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Keban (2014:4) yang menyatakan bahwa adm.publik merujuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan lembaga pemerintah atau negara. Hal tersebut selaras dengan konsep kolaborasi dan manajemen bencana yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Semarang guna menanggulangi bencana tanah longsor. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta memperlancar proses manajemen bencana maka diperlukan kerjasama atau kolaborasi antar *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang. Kolaborasi antar *stakeholders* atau *collaborative governance* adalah bentuk tata kelola pemerintahan di mana satu atau lebih organisasi publik (pemerintah) bekerjasama secara langsung dengan organisasi non pemerintah dalam pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program dalam rangka mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash: 2007).

Stakeholders tersebut meliputi Pemerintah Kota Semarang sebagai *leading sector*, dan didukung oleh masyarakat, serta pihak swasta sebagai *supporting system*. Ketiga *stakeholders* tersebut saling bekerjasama melalui berbagai tahapan kolaborasi guna mencapai tujuan bersama, yakni terlaksananya manajemen bencana yang baik dalam menanggulangi bencana tanah longsor di Kota Semarang. Dengan adanya kolaborasi dalam manajemen bencana tersebut maka bencana tanah longsor dapat ditanggulangi sehingga mengurangi jumlah korban dan kerugian di masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua landasan teori yakni *Collaborative Governance* dan Manajemen Bencana, kedua landasan teori tersebut digunakan untuk menilai sejauhmana proses kolaborasi dalam manajemen bencana tanah longsor yang ada di Kota Semarang.

Terdapat beberapa artikel yang membahas mitigasi bencana, artikel pertama ditulis oleh Emiliyati, et al pada tahun 2016 dengan judul Manajemen Mitigasi Bencana dengan teknologi Informasi di Kabupaten Ciamis juga meneliti terkait manajemen bencana, khususnya dibidang sistem informasi kebencanaan. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah terbentuknya prototipe sistem informasi kesehatan di Kabupaten Ciamis yang diberi nama "Sistem Informasi Bencana Padjajaran (SIMBARAN)" berisi elemen kesehatan yang dibutuhkan selama proses manajemen bencana berjalan. Artikel kedua ditulis oleh Rahman pada tahun 2015 dengan judul Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada upaya peningkatan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan mitigasi bencana di Kabupaten Banjarnegara dilakukan secara struktural dan non struktural, mitigasi struktural dilakukan dengan penyusunan data base daerah potensi bahaya dan pemasangan *early warning system (EWS)* sedangkan mitigasi non struktural dilakukan dengan pemberian informasi, sosialisasi, serta pelatihan dan simulasi bencana. Kedua tahapan mitigasi tersebut berguna untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor di Kab. Banjarnegara.

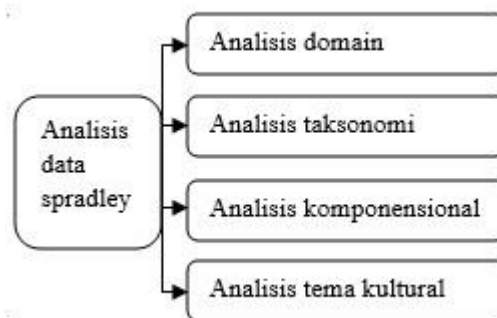
Artikel ketiga ditulis oleh Annisa pada tahun 2019 dengan judul Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kapasitas mitigasi bencana Desa Tempur cenderung cukup baik dengan persentase 72 persen, dan kapasitas kesiapsiagaan bencana Desa Tempur cenderung sangat setuju dengan persentase 54 persen, sedangkan kapasitas bertahan hidup terhadap bencana didasarkan pada adaptasi ekonomi, sosial, struktural dan kultural. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bertujuan untuk melihat dan menganalisis proses kolaborasi antar *stakeholders* dalam manajemen

bencana tanah longsor di Kota Semarang, agar bencana tersebut tidak kembali terulang setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Situs yang diambil adalah beberapa *stakeholders* yang saling bekerjasama dalam menangani bencana tanah longsor di Kota Semarang meliputi : sektor pemerintah, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian sektor swasta/privat, yakni perusahaan yang bekepentingan dengan potensi yang ada di Kecamatan Gajahmungkur, serta kelompok masyarakat yang diwakili oleh *NGO* dan *LSM*. Fokus penelitian menggunakan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007). Alasan dipilihnya model *collaborative governance* karena model tersebut dinilai relevan untuk melihat bagaimana proses kerjasama antar *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang yang terdiri dari: a) Proses kolaborasi; b) Kondisi awal; c) Desain kelembagaan; d) Kepemimpinan fasilitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Spradley, yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Tahap pertama peneliti berusaha untuk menemukan gambaran umum tentang obyek penelitian yakni proses kolaborasi yang dilakukan oleh ketiga *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang melalui analisis domain. Tahap berikutnya peneliti mencoba untuk menjabarkan analisis domain yang telah diperoleh secara lebih rinci dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber terkait. Pada tahap ketiga peneliti berupaya untuk menemukan ciri-ciri spesifik dari proses manajemen bencana yang dilakukan oleh tiap-tiap *stakeholders*. Tahapan terakhir peneliti berusaha untuk menemukan hubungan/benang merah dari data-data yang telah diperoleh kemudian mengintegrasikannya menjadi satu-kesatuan, sehingga dapat menggambarkan bagaimana proses kolaborasi yang terjadi antar *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang.



Gambar 1. Analisis Data Spradley

Sumber : Spradley (dalam Sugiyono, 2018:146)

Setelah semua data hasil penelitian dianalisis langkah berikutnya adalah uji keabsahan data. Uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data, dengan menggunakan teknik triangulasi maka data yang diperoleh akan menghasilkan informasi yang valid dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Antar *Stakeholders* (*Collaborative Governance*): Kondisi Awal

Menurut Ansell dan Gash (2007) terdapat tiga variabel penting yang berpengaruh terhadap kondisi awal munculnya *collaborative governance* yang meliputi, ketidakseimbangan sumber daya, sejarah yang melatarbelakangi, dan inisiatif untuk berpartisipasi. Ketiga kondisi awal tersebut

berpengaruh pada proses *collaborative governance* yang terjadi selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut peneliti kemudian mencari gambaran umum terkait kondisi awal yang melatarbelakangi kolaborasi antar *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor yang ada di Kota Semarang.

Menurut Wilonoyudho (2010) Kolaborasi dalam manajemen bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang disebabkan karena wilayah Kota Semarang khususnya di Kecamatan Gajah Mungkur seringkali dilanda bencana tanah longsor setiap tahunnya, selain itu bencana tanah longsor juga menyebabkan kerugian harta benda yang tidak sedikit, serta bencana tanah longsor juga menyebabkan sebagian masyarakat harus mengungsi ketempat yang lebih aman. Tidak jarang bencana tanah longsor juga turut memakan korban jiwa dari penduduk setempat. Menurut Rahman (2007) Salah satu faktor utama yang menyebabkan bencana tanah longsor sering terjadi adalah kurang tertibnya tata guna lahan, oleh sebab itu diperlukan kolaborasi antar *stakeholders* guna memperbaiki tata guna lahan, serta menanggulangi bencana tanah longsor. Ketidakseimbangan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyebabkan pemerintah harus bekerjasama dengan pihak swasta dan juga kelompok masyarakat guna memenuhi sumber daya yang dibutuhkan dalam proses manajemen bencana meliputi : sumber daya manusia, anggaran yang dibutuhkan, fasilitas pendukung, dan lain sebagainya. Dengan adanya kolaborasi antar *stakeholders* maka kebutuhan akan sumberdaya tersebut dapat terpenuhi, serta masing-masing *stakeholders* mempunyai tugas dan tanggungjawab tersendiri dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga *stakeholders* yang ada di lapangan diperoleh beberapa informasi, salah satunya dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah dalam hal ini BPBD memberikan keterangan bahwa selama ini Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha keras dalam melakukan manajemen bencana tanah longsor di Kec. Gajahmungkur, namun hal tersebut belum mampu memperoleh hasil yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya berupa anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dalam menanggulangi bencana tanah longsor, sebab anggaran bencana tersebut juga dibagi untuk penanganan bencana lain seperti banjir, rob, kebakaran, dsb. Narasumber kedua dari pihak swasta turut memberikan keterangan bahwa manajemen bencana yang selama ini dilakukan bersama dengan pemerintah dan masyarakat mengalami beberapa hambatan seperti waktu koordinasi yang terbatas, kurangnya personel, dan juga kurangnya inisiatif dari masyarakat sekitar dalam rangka pencegahan bencana tanah longsor sehingga bencana tersebut masih sering terjadi. Keterangan terakhir diungkapkan oleh perwakilan dari kelompok masyarakat yang menyebutkan bahwa selama ini manajemen bencana yang dilakukan kurang begitu efektif sebab kegiatan manajemen bencana tersebut dilakukan pada saat mendekati musim penghujan sehingga persiapannya pun cenderung kurang. Hal itulah yang menyebabkan kolaborasi dalam manajemen bencana tanah longsor belum mampu berjalan dengan efektif dan masih memerlukan banyak perbaikan.

Kolaborasi Antar Stakeholders (Collaborative Governance): Desain Kelembagaan.

Desain kelembagaan atau institusi menurut Murdock dalam (Ansell and Gash, 2007) mengacu pada aturan dasar *collaborative governance* yang jelas dan konsisten, mengaktualisasikan para pemangku kepentingan bahwa prosesnya adil dan terbuka (transparan). Sejalan dengan pernyataan tersebut, De Save dalam Sudarmo (2011) menyatakan salah satu indikator keberhasilan *collaborative governance* adalah adanya kepastian siapa saja *stakeholders* yang berpartisipasi, aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan program, dan fokus yang terbatas dari masing-masing *stakeholders*. Menurut Faturahman (2017) Reformasi sistem kelembagaan dalam penanganan bencana sangatlah dibutuhkan guna mempercepat kinerja organisasi. Desain kelembagaan itulah yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam manajemen bencana tanah longsor.

Desain kelembagaan yang ada dalam manajemen bencana tanah longsor salah satunya bersumber dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pada proses manajemen bencana terdapat 3 tahapan, yakni

tahap pra bencana, tahap saat bencana terjadi, dan tahap pasca bencana terjadi. *Stakeholders* yang menjadi *leading sector* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dibantu dengan Dinas Lingkungan Hidup, serta *stakeholders* lain yang berasal dari pemerintah. Selain dari pihak pemerintah terdapat *stakeholders* lain yang berasal dari pihak swasta/privat. *Stakeholders* tersebut memiliki kepentingan terkait dengan bisnis dan juga pemanfaatan ruang yang ada di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang sehingga *stakeholders* tersebut memiliki tanggungjawab untuk merawat dan menjaga wilayahnya agar tidak sampai terjadi bencana tanah longsor. Selain dari pihak swasta, kelompok masyarakat juga menjadi salah satu elemen penting dalam manajemen bencana tanah longsor. Masyarakat sebagai penduduk asli di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur tentunya lebih memahami kondisi dan karakteristik wilayah tempat tinggalnya. Hal tersebut tentu dapat membantu Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam proses manajemen bencana tanah longsor baik pada pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber diperoleh beberapa informasi, salah satunya berasal dari kelompok masyarakat. Perwakilan dari kelompok masyarakat memberikan keterangan bahwa selama ini mereka sudah membuat struktur/desain yang digunakan dalam manajemen bencana khususnya tanah longsor, namun dalam perkembangannya struktur kelembagaan tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar karena struktur kelembagaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Narasumber kedua dari pihak pemerintah turut memberikan keterangan. Keterangan tersebut disampaikan oleh kepala satgas manajemen bencana BPBD Kota Semarang yang menyatakan bahwa sejak awal pemerintah sudah mendesain struktur kelembagaan yang ada dalam manajemen bencana, namun seiring berjalannya waktu struktur kelembagaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena seringnya rotasi pegawai OPD yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tugas dan fungsi yang ada dalam struktur kelembagaan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Keterangan terakhir diberikan oleh NGO yang turut membantu kegiatan manajemen bencana tanah longsor. NGO tersebut memberikan keterangan bahwa kegiatan manajemen bencana yang saat ini dilakukan belum berjalan dengan efektif karena kurangnya pelibatan dari pihak swasta atau NGO dalam penyusunan kegiatan maupun pada saat evaluasi sehingga *stakeholders* tersebut tidak dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang bagaimana penanganan atau manajemen bencana yang baik guna menanggulangi bencana tanah longsor yang ada di Kota Semarang.

Kolaborasi Antar Stakeholders (Collaborative Governance): Kepemimpinan Fasilitatif.

Kepemimpinan fasilitatif menurut Ansell dan Gash (2007) "leadership is crucial for settings and maintaining clear ground rules, building trust, facilitating dialogue, and exploring mutual gains". Kepemimpinan yang fasilitatif berperan penting dalam proses collaborative governance. Fungsi dari kepemimpinan fasilitatif tersebut adalah membawa semangat kolaborasi kepada seluruh stakeholders yang terlibat dalam kegiatan manajemen bencana tanah longsor. Menurut Sinaga (2015) Kepemimpinan dalam hal penanganan bencana dan kesehatan merupakan unsur terpenting yang sangat menentukan keberhasilan penanganan korban bencana.

Proses kepemimpinan dalam rangka manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang dipegang oleh BPBD Kota Semarang. BPBD dalam hal ini bertugas sebagai koordinator sekaligus instansi yang bertugas secara langsung dalam proses manajemen bencana tanah longsor. Sebagai koordinator BPBD Kota Semarang memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran proses kolaborasi dengan *stakeholders* lain. Oleh sebab itulah kepemimpinan fasilitatif diperlukan dalam proses kolaborasi agar masing-masing *stakeholders* dapat menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Seiring berjalannya waktu koordinasi yang dilakukan oleh BPBD mengalami beberapa kendala seperti kurangnya respon dari stakeholders lain, serta waktu koordinasi yang selalu dilakukan mendekati pelaksanaan kegiatan. Hasilnya koordinasi yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal dan hanya beberapa *stakeholders* yang hadir pada saat pelaksanaan kegiatan.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber lapangan diperoleh beberapa informasi terkait dengan kolaborasi dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang. Narasumber pertama yakni dari pihak pemerintah menjelaskan bahwa selama ini yang menjadi koordinator atau leading sector dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang adalah BPBD. Selama proses manajemen bencana berlangsung BPBD bertugas untuk memberikan arahan-arahan kepada *stakeholders* lain tentang kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada saat bencana tanah longsor terjadi. Keterangan berikutnya diberikan oleh narasumber kedua yang berasal dari pihak swasta yang ikut terlibat dalam kegiatan manajemen bencana. Pihak swasta menjelaskan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh BPBD selama ini sudah cukup baik, namun pihak swasta juga memberikan masukan agar pemerintah melibatkan OPD lain dalam proses manajemen bencana seperti Dinas PUPR, DLH, dan juga Dinas Sosial agar manajemen bencana berjalan lebih efektif dan efisien. Narasumber yang terakhir adalah NGO pecinta lingkungan yang ikut dilibatkan dalam kegiatan manajemen bencana guna membantu pemerintah dalam merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah yang baru saja dilanda bencana. NGO tersebut juga memberikan keterangan bahwa selama ini mereka sering diundang dalam kegiatan pemerintah terkait manajemen bencana, namun masih sebatas kegiatan di lapangan dan jarang sekali untuk ikut berdiskusi dalam membuat kebijakan baru terkait manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang.

Kolaborasi Antar *Stakeholders* (Collaborative Governance): Proses Kolaborasi.

Proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007:158-161) terdiri dari lima tahapan kolaborasi yaitu : 1) bertatap muka, 2) membangun kepercayaan, 3) proses dalam mencapai komitmen, 4) pemahaman atas keputusan bersama, 5) hasil sementara. Kelima tahapan itulah yang kemudian dijadikan dasar dalam membangun relasi yang kuat antar *stakeholders* guna menanggulangi bencana tanah longsor di Kota Semarang. Proses kolaborasi merupakan tahapan yang paling menentukan terhadap berhasil atau tidaknya kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang. Proses kolaborasi yang berjalan dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang diawali dengan proses tatap muka (*face to face*) antar *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan manajemen bencana. Agenda tatap muka tersebut dilakukan dalam sebuah rapat forum yang mengundang seluruh *stakeholders* yang terlibat, baik dari pihak pemerintah, swasta, dan juga kelompok masyarakat. Kegiatan tatap muka dimanfaatkan oleh para *stakeholders* untuk saling bertukar pikiran dan menyatukan pendapat tentang hal-hal yang terkait dengan manajemen bencana, namun dalam tahapan ini pihak swasta/privat jarang sekali terlihat hadir.

Setelah melalui proses tatap muka maka agenda berikutnya adalah membangun kepercayaan antar *stakeholders*. Tahap membangun kepercayaan tersebut dilakukan dengan melakukan komunikasi secara intensif dan saling mensosialisasikan program yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* dalam manajemen bencana. Menurut Asteria (2016) Komunikasi yang efektif dengan berbagai pendekatan yang sesuai dapat mempermudah pencapaian tujuan dan mempererat hubungan antar *stakeholders*. Berikutnya menurut Budi (2012) menjelaskan bahwa aspek komunikasi dalam manajemen bencana adalah aspek yang paling krusial sehingga diperlukan pendalaman dalam prosesnya. Tahapan membangun kepercayaan ini juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena melibatkan banyak *stakeholders*. Selanjutnya setelah tahap membangun kepercayaan langkah yang harus dilakukan dalam proses manajemen bencana adalah komitmen dalam mencapai hasil. Komitmen merupakan sebuah hal penting yang menjadi kunci kesuksesan sebuah program, dalam hal ini manajemen bencana tanah longsor.

Komitmen awal dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam proses manajemen bencana adalah agar bencana tanah longsor yang sering melanda wilayah Kecamatan Gajah Mungkur tidak terulang kembali, serta memperbaiki fasilitas yang rusak akibat bencana tanah longsor, dan mengedukasi masyarakat sekitar agar memiliki kemampuan dalam manajemen bencana, khususnya tanah longsor. Tahapan terakhir dalam proses manajemen bencana adalah memperoleh hasil sementara dari kegiatan yang telah dilakukan oleh berbagai *stakeholders* dalam

menanggulangi bencana tanah longsor di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur. Hasilnya kolaborasi yang selama ini dilakukan oleh berbagai *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antar *stakeholders* dalam pembagian tugas maupun kewenangan sehingga menyebabkan proses manajemen bencana tidak dapat berjalan dengan lancar. Faktor lain yang menghambat proses manajemen bencana adalah minimnya peran dan dukungan dari pihak swasta selama proses manajemen bencana berlangsung, serta sumber daya dan fasilitas penunjang yang belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh keterangan terkait proses manajemen bencana yang melibatkan beberapa *stakeholders*. Keterangan pertama diberikan oleh narasumber yang berasal dari kelompok masyarakat. Perwakilan narasumber dari kelompok masyarakat menjelaskan bahwa proses kolaborasi yang selama ini berjalan cenderung didominasi oleh peran dari pemerintah, sedangkan masyarakat sendiri jarang sekali dilibatkan dalam pembuatan keputusan dan hanya dilibatkan dalam beberapa agenda kegiatan saja. Narasumber lain dari pihak swasta juga memberikan keterangan yang hampir sama yakni jarang dilibatkannya mereka dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan manajemen bencana. Pihak swasta lebih sering dilibatkan pada agenda-agenda kegiatan yang sifatnya sosialisasi atau pemberian bantuan kepada korban bencana tanah longsor yang ada di Kota Semarang. Keterangan terakhir diberikan oleh pihak pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Semarang. Pihak BPBD menjelaskan bahwa proses manajemen bencana merupakan tahapan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari tiap-tiap *stakeholders*. Apabila proses kolaborasi yang selama ini dilakukan belum mampu mencapai hasil yang diinginkan maka pemerintah dan *stakeholders* terkait akan terus mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya dalam hal manajemen bencana, khususnya tanah longsor.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa kolaborasi antar *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang telah melalui berbagai tahap kolaborasi mulai dari kondisi awal hingga memperoleh hasil sementara dari proses kolaborasi. Hasil dari proses kolaborasi dalam manajemen bencana tanah longsor yang dilakukan oleh berbagai *stakeholders* tersebut belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi dan minimnya peran serta atau partisipasi aktif dari *stakeholders* lain yang ada di luar sektor pemerintah sehingga menghambat proses kolaborasi dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. 2019. Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. *Skripsi*. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Anisatul. (2020). *1.500-an Tanah Longsor Terjadi di Jawa Sepanjang 2020*. Diunduh di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210120180904-4217538/1500-an-tanah-longsor-terjadi-di-jawa-sepanjang-2020/> tanggal 27 Maret 2021.
- Ansell, C. & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18(4): 543-571.
- Asteria, D. (2016). Optimalisasi Komunikasi Bencana di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana. *Jurnal Komunikasi*. 1(1): 1-11. FISIP. Universitas Indonesia
- Budi, S. (2012). Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi, Kerjasama). *Jurnal Komunikasi*. 1(4): 363-372. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
- Emaliyawait, et al. 2016. Manajemen Mitigasi Bencana dengan Teknologi Informasi di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Keperawatan*. 4(1): 79-88. Bandung. Universitas Padjajaran.
- Faturahman. (2017). Reformasi Administrasi Dalam Manajemen Bencana. Paper. 1(2): 185-201. Malang. Universitas Brawijaya
- Keban, Y., (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.



- Nurjanah, dkk. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Paidi. (2012). Pengelolaan Manajemen Risiko Bencana Alam di Indonesia. *Jurnal Manajemen*. Jakarta. STIE Dharma Bumiputera.
- Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Rahman, A.Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kota Banjarnegara. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. 1(1): 1-14.
- Sinaga, N.S. (2015). Peran Petugas Kesehatan Dalam Manajemen Penanganan Bencana Alam. *Jurnal Ilmiah Integritas*. 1(1): 54-68. Medan. Akbid Mitra Husada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I., (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.